

Persepsi Pengelola Program Studi Bidang Ilmu Komunikasi se-Indonesia tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Wisnu Widjanarko¹, Fitria Ayuningtyas², Yuliati³, Lisa Adhriati⁴, S. Bakti Istiyanto⁵

^{1,5} Universitas Jenderal Soedirman

²UPN Veteran Jakarta

^{3,4}Universitas Bengkulu

*) Surel Korespondensi: wisnuwidjanarko@unsoed.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 2 September 2023; direvisi 15 November 2023; diputuskan 22 Desember 2023

Abstrak

Kebijakan transformatif pendidikan tinggi Indonesia melalui model Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi sistem pendidikan yang selama ini telah mapan, termasuk salah satunya adalah rumpun ilmu komunikasi. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pengelola program studi dalam rumpun ilmu komunikasi tentang kebijakan tersebut. Riset yang dilakukan pada akhir tahun 2022 dengan pendekatan survei, terhadap 122 pengelola program studi dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan : 1) 81,9 % pengelola program studi meyakini program ini membantu mahasiswanya siap untuk untuk berdaya saing setelah lulus; 2) 86,9 % program studi telah memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan model MBKM; 3) Terdapat dinamika persepsi pada pengelola program studi, khususnya terkait dengan konversi kredit mata kuliah dalam konteks capaian pembelajaran. Untuk peningkatan implementasi MBKM, ke depan diperlukan penguatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri yang difasilitasi asosiasi program studi dan kesepakatan prosedur operasional baku dalam mekanisme konversi.

Kata kunci: ilmu komunikasi; MBKM; persepsi.

Abstract

The Freedom Learning (MBKM) model's transformative objectives for higher education in Indonesia presents a challenge within itself for the existing educational system, one of which is the cluster of communication sciences. The purpose of this study is to ascertain how this policy is viewed by the administration of study programs. A survey-based study completed at the end of 2022 revealed 122 studies of program managers from public and private universities across Indonesia. Based on the survey's findings: 1) 81.9% of study program managers consider this program helps students be prepared for competition after graduation; 2) Using the MBKM approach, 86.9% of study programs have made more accessible for students to choose off-campus learning; 3) Out of nine forms of learning activities offered by the government, 80.3% of students selected the apprenticeship program in the workplace as their top choice. In order to enhance the adoption of MBKM, it will be important in the future to foster collaboration with business and industry, facilitated by study program associations and agreement on standardized operating procedures in the conversion mechanism.

Keywords : *communication science; freedom learning, perception.*

Pendahuluan

Salah satu tantangan dalam dunia perguruan tinggi adalah bagaimana mempersiapkan lulusannya menjadi adaptif dan berdaya saing di dunia usaha dan industri. Survei Angkatan Kerja Nasional dari BPS pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 796.980 lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Kajian yang dilakukan oleh Program Praktisi Mengajar pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa 80% perusahaan di Indonesia sulit mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang siap pakai dengan faktor utama penyebab adalah kesenjangan keterampilan lulusan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha. Uniknyanya adalah di saat yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan merilis informasi bahwa di tahun yang sama terdapat kenaikan kesempatan kerja terbuka sebanyak 2,4 juta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada tahun 2020 telah mengidentifikasi tantangan pendidikan tinggi di Indonesia adalah bagaimana merancang pembelajaran sebagai yang menghadirkan pengalaman menyenangkan, melibatkan ragam pemangku kepentingan, berorientasi pada kompetensi dan nilai, berpusat pada peserta didik serta memastikan relevan dengan industri. Untuk itu, maka ditetapkanlah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai upaya transformatif pemerintah dalam mempersiapkan lulusan yang utuh, unggul dan berdayasaing. Melalui kebijakan MBKM ini, maka lulusan pendidikan tinggi diharapkan meningkatkan, baik *soft skills* maupun *hard skills* melalui fasilitasi pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat dan potensinya, termasuk memberi ruang pembelajaran yang kontekstual dan fleksibel, seperti pembelajaran di luar kampus, bahkan termasuk di luar disiplin bidang ilmu keutamaannya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdapat 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran, yakni pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, riset, proyek

kemanusiaan, kewirausahaan, studi/proyek independen, membangun desa, dan bela negara.

Perguruan tinggi bidang ilmu komunikasi memiliki fokus pada upaya pembentukan lulusan yang mampu bersaing. Tidak hanya pengetahuan, maka keterampilan yang dibutuhkan di mana pun ruang profesi adalah standar profesional, inovasi, dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah beradaptasi di tempat kerja (Striany et al., 2023; Waluyo, 2018; Widjanarko et al., 2023) Dalam konteks tersebut, hal ini sungguh merupakan sebuah peluang tersendiri sekaligus tantangan, mengingat dunia kerja pada bidang jurnalisme, produksi media, publik hubungan, dan komunikasi strategis, telah menetapkan standar kompetensi tersendiri di dunia kerja sehingga perlu adanya upaya penyesuaian yang berkesinambungan. Pada perspektif inilah, maka MBKM sebenarnya menjadi salah satu proses yang dirancang untuk mempercepat mahasiswa beradaptasi sedini mungkin sekaligus memberikan dampak terhadap lingkungan tempat kegiatan tersebut dilakukan (Aswita, 2022; Lusiana et al., 2022; Rochana et al., 2021; Widjanarko et al., 2021). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai sebuah kebijakan baru, MBKM juga memiliki tantangan dan dinamika tersendiri (Hasanah, 2022; Hastangka & Hidayah, 2023; Putra et al., 2022).

Penelitian ini berupaya mengetahui bagaimana persepsi pengelola program studi ilmu komunikasi di Indonesia – khususnya pada jenjang sarjana dan diploma – terhadap kebijakan MBKM sebagai upaya percepatan adaptasi dan daya saing mahasiswa ilmu komunikasi di dunia kerja. Hal ini mempunyai arti yang sangat strategis, mengingat pengelola program studi mempunyai tanggung jawab terhadap capaian pembelajaran dan berkomitmen untuk membentuk profil lulusan yang berpegang pada standar nasional pendidikan tinggi, sekaligus sejalan dengan sinyal pasar yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitiannya adalah persepsi terhadap kebijakan MBKM pada perguruan tinggi ilmu komunikasi. Subyek penelitian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 112 pengelola program studi ilmu komunikasi – program sarjana dan diploma – yang tergabung dalam Asosiasi Pendidikan Tinggi Komunikasi (ASPIKOM). Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat 122 responden yang mencerminkan keterwakilan disiplin ilmu komunikasi dari aspek vokasi maupun akademik, termasuk keterwakilan wilayah geografis, akreditasi, dan status perguruan tinggi. 86 % menggunakan nomenklatur ilmu komunikasi, ada pun 14 % menggunakan nomenklatur yang lebih spesifik namun tetap mengindikasikan pada disiplin ilmu komunikasi. Selain itu, pendidikan akademis dibandingkan pendidikan praktis mendominasi pendidikan tinggi ilmu komunikasi di Indonesia. Sehingga lulusan mampu menerapkan bidang kompetensinya dengan memanfaatkan pengetahuannya pada prinsip-prinsip teori tertentu. Ada pun 72,1% pendidikan tinggi ilmu komunikasi di Indonesia dikelola oleh perguruan tinggi swasta.

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan menjadi nilai mendasar bagi program studi. Terdapat 49,1 % program studi telah memperoleh akreditasi B dan Sangat Baik. Ada pun 27,1 % telah terakreditasi A atau Unggul, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat 23,5% yang perlu membutuhkan performa manajemen dan kinerja, meskipun telah dinyatakan C atau Baik. Berdasarkan kewilayahan, 71,4 % program studi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, di mana tidak dapat dipungkiri sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Pulau Sumatera dan Sulawesi berada di urutan berikutnya, dengan persentase masing-masing sebesar 15,6% dan 6,6%. 6,4% lainnya tersebar di

berbagai pulau atau gugusan pulau, termasuk Kalimantan, Bali & Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan ketiga pulau tersebut yang disebutkan di awal.

Para pengelola program studi ilmu komunikasi pada tingkat sarjana, sarjana terapan, dan ahli madya menyadari sepenuhnya akan pentingnya mempersiapkan lulusan yang berdaya saing sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk industri, dunia usaha, dan komunikasi. bekerja. Ilmu komunikasi merupakan disiplin ilmu yang dituntut untuk selalu adaptif terhadap dinamika perilaku sosial.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada pertengahan semester kedua tahun 2022 ini, maka dari 122 responden, 81,9% pengelola program studi menilai kebijakan MBKM memiliki manfaat strategis karena membantu mahasiswa sedini mungkin untuk bersiap menghadapi pasar kerja dan berdaya saing. Selain itu, 86,9% pengelola program studi telah memfasilitasi hak belajar di luar kampus bagi mahasiswa mulai semester genap tahun ajaran 2020–2021 atau semester pertama tahun 2021. Selanjutnya dari sembilan bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih mahasiswa di MBKM-nya, mahasiswa mayoritas memilih magang di dunia usaha/industri sebesar 80,3%, selanjutnya berturut-turut adalah pertukaran pelajar dan asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu masing-masing 62,3% dan 45,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam bentuk kegiatan pembelajaran sejalan dengan profil lulusan ilmu komunikasi yang pada umumnya mempersiapkan diri untuk mampu bekerja di industri, dunia usaha, dan pekerjaan komunikasi, seperti di media massa, penyiaran, hubungan masyarakat, periklanan dan sejenisnya. Ketertarikan pertukaran pelajar ini difasilitasi oleh Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dimana berlangsung mobilitas mahasiswa antar kampus antar pulau berbasis antar pulau. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar di luar kampus tetapi juga pengalaman komunikasi lintas budaya yang lebih otentik. Bentuk kegiatan pembelajaran seperti asistensi

mengajar juga difasilitasi melalui Program Kampus Mengajar, di mana siswa mendapat kesempatan belajar mengembangkan rasa kebangsaan melalui dukungan pembelajaran literasi bagi siswa sekolah dasar, kapasitas manajerial, termasuk kesempatan pengembangan kemampuan.

Pada penelitian ini juga ditemukan, bahwa terdapat dinamika permasalahan terkait kegiatan MBKM, khususnya besaran jumlah SKS yang dikonversi yang terkait dengan keselarasan capaian pembelajaran lulusan. Hal ini terjadi ketika masih ada mata kuliah wajib yang harus diambil dan kegiatan pembelajaran pilihan tersebut tidak terlalu berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Kurangnya pendanaan dan ketersediaan mitra bagi MBKM juga merupakan permasalahan lain yang menyebabkan sulitnya menemukan mitra dengan berbagai latar belakang yang dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang berkualitas dan tepat guna.

Para pengelola program studi ilmu komunikasi sejatinya memahami betul bahwa mempersiapkan lulusan yang unggul, berdaya saing sekaligus memenuhi kebutuhan dunia kerja adalah sebuah keniscayaan. Hal ini diwujudkan melalui penentuan hasil pembelajaran dan profil lulusan dalam desain kurikulum. Sebagai sebuah terobosan, kebijakan MBKM tentu saja menjadi tantangan bagi pengelola program. Akuntabilitas mutu lulusan menjadi artikulasi integritas dan nilai-nilai moral yang dilakukan, mengingat fasilitasi hak belajar di luar kampus terikat pada pengakuan dan/atau pemerataan kegiatan tersebut dalam hasil pembelajaran yang dilaksanakan di kampus. Hal ini juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pengelola khususnya dalam memilih mitra yang tepat sebagai fasilitator pembelajaran bagi mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi. Aspek pembiayaan juga menjadi faktor yang mendapat perhatian khusus.

Namun yang membuat kajian ini istimewa adalah bagaimana pengelola program studi ilmu komunikasi memandang MBKM, terlepas dari segala kesulitan yang

menyertainya. Tradisi atau praktik manajemen humas yang menuntut kemampuan tidak hanya dalam berinteraksi namun juga bagaimana menjaga hubungan yang adil dan saling menguntungkan, sangat sejalan dengan kemampuan mengelola persepsi yang positif dan konstruktif. Kapasitas untuk menegakkan hal ini sebenarnya termasuk dalam lingkup strategi, kebijakan, dan prosedur. Hal ini juga mencakup penerapan jejaring sosial, kemahiran dalam menganalisis dan menafsirkan ekspektasi audiens sebagai landasan pengambilan keputusan, serta penyebaran saran tentang cara mengelola hubungan pemangku kepentingan yang efektif melalui peningkatan transparansi perilaku dan keterwakilan yang dapat diandalkan. Selalu mendengarkan dan menghargai pemangku kepentingan sambil tetap memperhatikan kinerja dan memenuhi tuntutan perusahaan dan audiens melalui komunikasi dua arah dan peran manajemen yang unik menjadi tugas tersendiri (Broom & Sha, 2013; Wilcox et al., 2015).

Persepsi positif ini menjadi modal sosial bagi ekosistem pendidikan komunikasi yang selaras dengan dunia usaha, industri, dan komunikasi. Simpul jaringan dengan mitra, rasa saling percaya dalam pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta penegakan norma yang menjaga integritas dan kapasitas belajar, akan menjadi elemen strategis dalam membentuk postur lulusan ilmu komunikasi yang relevan dengan kebutuhan waktu. Asosiasi yang membawahi pendidikan tinggi ilmu komunikasi ini dapat dengan tulus membantu menyelesaikan permasalahan termasuk perjanjian konversi, pendanaan, dan kesesuaian mitra. Organisasi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara institusi akademis dan bisnis. Selain itu, asosiasi ini diharapkan dapat mendukung pengembangan praktik operasi yang seragam untuk metode pengakuan atau penyeteraan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan MBKM dipandang positif dan konstruktif oleh pengelola program ilmu komunikasi Indonesia. Banyak pihak yang beranggapan bahwa kurikulum ini cocok untuk

meningkatkan daya saing dan kemampuan beradaptasi siswa setelah lulus. Meski pilihan MBKM sangat beragam, mahasiswa paling sering memilih magang di dunia usaha dan industri. Hal ini sejalan dengan upaya membantu mahasiswa mengembangkan profil lulusan, khususnya yang bekerja di sektor jasa dunia usaha dan industri komunikasi.

Tantangan utama dalam menetapkan model pembelajaran MBKM sebagai kebijakan baru adalah mempersiapkannya menjadi alternatif pilihan pembelajaran yang akurat, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh pengelola program studi. Oleh karena itu, diperlukan peran strategis dari asosiasi penyelenggara program studi ilmu komunikasi dalam memfasilitasi kampus dalam mendapatkan mitra yang tepat serta ketersediaan panduan operasional dalam menjalankan kebijakan tersebut tanpa mengurangi kekhasan masing-masing perguruan tinggi.

Ucapan Terima Kasih

Riset ini merupakan bagian dari kajian Bidang MBKM pada Departemen Kerja Sama Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (PP-ASPIKOM).

Referensi

- Aswita, D. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9(2), 56.
<https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11747>
- Broom, G. M., & Sha, B.-L. (2013). *Cutlip and Center's : Effective Public Relations* (11th ed.). Pearson Education Limited.
- Hasanah, U. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Tantangan dan Prospek Kedepan. *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2(1), 26–40.
<https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i1.15>
- Hastangka, & Hidayah, Y. (2023). KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR-. *Jurnal Muara Pendidikan*, 8(1), 1–16.
- Lusiana, Y., Widjanarko, W., & Dewi, W. C. (2022). Peran Kampus Mengajar dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi pada Siswa SDN Klepu 02 Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Layanan Masyarakat*, 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jlm.v6i2.2022.439-447>
- Putra, B. A., Salsabila, A. I., Nabila, K. R., & Zakiah, R. (2022). Peluang dan Tantangan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(01), 6–13.
<https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i01.1399>
- Rochana, R., Darajatun, R. M., & Ramdhany, M. A. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka terhadap Minat dan Keterlibatan Mahasiswa. *Journal of Business Management Education (JBME)*, 6(3), 11–21.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JBME/article/view/40165>
- Striany, I., Istiyanto, S. B., & Widjanarko, W. (2023). PERAN HUMAS PT . BANGUN TENERA RIAU PADA PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL. *MetaCommunication*, 8(1), 33–44.
- Waluyo, D. (2018). Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 167.
<https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220206>
- Widjanarko, W., Lusiana, Y., Mufrida, F., & Robami, M. E. (2021). Peran Mahasiswa sebagai Penggerak Literasi Bahasa dalam Program Kampus Mengajar Di SD Negeri 02 Longkeyang, Kabupaten Pemasang, Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Seni 2021*, 237–241.
- Widjanarko, W., Sumarmono, J., & Rahayu, A. Y. (2023). Pengelolaan Program Praktisi Mengajar Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2022. *Seminar Nasional Keguruan Dan Pendidikan*, 84–

88.

<https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/SNKP/article/view/1328>

Wilcox, D. L., Cameron, G. T., & Reber,
Bryan, H. (2015). *Public Relations :
Strategies and Tactics* (7th ed.). Pearson.